

putusan. Amandemen Pasal 27 Piagam PBB diharapkan dapat memperluas sarana-sarana berikut cara-cara pemaksaan yang diperlukan agar suatu negara dapat melaksanakan putusan Mahkamah Internasional.

- b. Pasal 12 ayat 1 Piagam PBB mengenai Majelis Umum tidak dapat mengajukan rekomendasi mengenai suatu perselisihan jika tidak dikehendaki langsung oleh Dewan Keamanan. Hal ini jelas akan menghambat penyelesaian suatu perselisihan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Majelis Umum pada saat Dewan Keamanan gagal melaksanakan fungsinya, juga mengenai kekuatan berlakunya Resolusi Majelis Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan ke 5*. Bandung: CV. KeniMedia.

Anwar, Chairul, 1989. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan.

Arend, Anthony Clark and Robert J. Beck. 1993. *International Law and the Use of Force*. London: Routledge.

- Hardiwinoto, Soekotjo. 2014. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Kuncahyono, Trias. 2013. *Musim Semi di Suriah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1977. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Mulyana, Imam. 2012. *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional Dalam Rangka Purna bakti Prof. Dr. Yudha Bhakt, S.H., M.H*, Bandung: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Samekto, Adji. 1977. *Negara dalam Tata Tertib Hukum Internasional*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setiyono, Joko. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Banten: Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 16*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Starke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaeman, Dina Y. 2017. *Salju di Aleppo*. Jakarta: PT Mitra Media Mustika.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal:

- Ardiyah dan Leatemia.2013. *Intervensi Pihak Asing dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*. Manado: Jurnal Lex et Societatis. Volume I, No. 4.
- Aribawa, I Gusti Ngurah Bagus. 1990. *Analisa Yuridik Terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Internasional*. Surabaya: Skripsi Sarjana Hukum.
- Darnela, Linda. 2012. *Legitimasi Resolusi Dewan Keamanan dalam Konflik di Darfur, Sudan*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 46, No. I.
- Eliza, Emi, Heryandi, dan Ahmad Syofyan. 2014. *Intervensi Kemanusiaan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata*. Lampung: Fiat Justisi Jurnal Ilmu Hukum. Volume VIII, No. 4.
- Rahayu.2012. *Eksistensi Prinsip 'Responsibility to Protect' dalam Hukum Internasional*.Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41. No. I.
- Rusli, Hardijan. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? Law Review*. Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V.
- Samekto, Adji. 1992. *Mengkaji Efektifitas Mahkamah Internasional Melalui Studi Kasus Sengketa Nicaragua – Amerika Serikat*. Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 5

Regulasi Hukum:

Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi antara Amerika Serikat dengan Nikaragua Tahun 1956

Piagam PBB

Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional

Statuta Mahkamah Internasional

Reports of International Court of Justice, Advisory Opinions and Orders: Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 1986

The Treaty of Friendship, Good-Neighbourliness and Cooperation between the Soviet Union and Afghanistan 1978

Produk Hukum PBB:

Resolusi Majelis Umum 2131 (XX) Tahun 1965 tentang *Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*

Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 1970 tentang *Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*

OPCW Report (EC-M-33/DEC.1) 2013 tentang *Decision on Destruction of Syrian Chemical Weapons*

Resolusi Dewan Keamanan No. 2118 Tahun 2013 tentang *Requires Scheduled Destruction of Syria's Chemical Weapons*

Resolusi Majelis Umum PBB No. 1001 (ES-I) Tahun 1956 tentang Penarikan Diri Pasukan Militer Israel dan Pembentukan UNCF

Resolusi Majelis Umum PBB No. 377 V Tahun 1950 tentang *Uniting For Peace Resolution*

Resolusi Majelis Umum PBB No. 2758 Tahun 1971 tentang *Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations*

Resolusi Majelis Umum PBB No. 3324 E (XXIX) Tahun 1974 tentang Pengeluaran Keanggotaan Afrika Selatan dari PBB

Resolution (A/67/997-S/2013/553), Report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab

*Republic on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus
on 21 August 2013*

Kamus:

Black's Law Dictionary Edisi ketujuh

Internet:

<http://ic-mes.org>

<http://internasional.kompas.com>

<https://international.sindonews.com>

<https://kumparan.com>

<https://obamawhitehouse.archives.gov>

<https://resistensia.org>

<https://sputniknews.com/>

<http://www.icj-cij.org>

www.antaraneews.com

www.bbc.com

www.berdikarionline.com

www.cnnindonesia.com

www.dunia.tempo.co

www.dw.com

www.internasional.republica.co.id

www.katadata.co.id

www.peacekeeping.un.org

www.republica.co.id

www.treaties.un.org

www.un.org

www.unmultimedia.org

www.voaindonesia.com